

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN EKONOMI DI KABUPATEN TEGAL 2009-2014

Eko Eddy Supriyanto

ABSTRACT

Pancasila as the national ideology is a political agreement as the Founding Father of Indonesia state Funded. Pancasila as the state becomes the foundation for all areas, not least of Economic Policy. But international competition through globalization is a challenge for family economic containing the values of Pancasila to expand its sovereignty.

The purpose of this study was to determine the Pancasila in the era of globalization and the implementation of Pancasila values in economic policy in Tegal regency views of the Medium Term Development Plan 2009-2014.

This study uses descriptive analytical research on Pancasila was conducted in Tegal regency by analyzing economic policy Tegal regency with the values of Pancasila, seen from the Medium Term Development Plan 2009-2014 Tegal regency.

The existence of Pancasila values in Tegal regency very obvious when viewed from the vision and mission, as well as Medium Term Development Plan 2009-2014. But in the translation program implementation vision and mission Tegal has not done optimally.

Keywords: Pancasila values, Globalization, Economic Pancasila.

A. PENDAHULUAN

Era reformasi yang sudah berjalan sejak 1988, membawa angin segar demokrasi dimana negara Indonesia mengawali tonggak sejarah baru yang terus bergulir ke dalam babak baru ke sebuah masa yang penuh kebebasan dalam menganut dan mengungkapkan suatu pandangan politik, namun sayang seribu sayang kebebasan itu berdampak pada penurunan pamor Pancasila, sehingga menjadikan sebuah alasan penulis untuk menyampaikan keprihatinannya terhadap merebaknya pandangan politik sektarian ditengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Lebih dari itu Pancasila dianggap tidak menjawab apa yang menjadi relevansinya terhadap tantangan ke depan, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Bung Karno menyebut pertama kali dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dihadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan keyakinan pokok dan penuh dari Bung Karno bahwa suatu negara Indonesia yang berdaulat dapat bertahan hanya apabila ia dibangun atas dasar yang dapat diterima oleh semua golongan, politik, dan agama. (A.C Manullang - 1986)

Sangat disesalkan mengingat sampai sekarang, belum terlihat jelas upaya mewujudkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila secara sungguh-sungguh dan tidak pernah sepenuh hati dilaksanakan secara konkret. Jangankan dilaksanakan dengan kesungguhan, keinginan membicarakannya saja cenderung ditinggalkan belakangan ini, Pancasila terkesan seperti ditelantarkan. Eksistensi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik terancam tamat jika dasar negara dan konstitusi tidak dijadikan ukuran dan acuan dalam berpikir serta berperilaku sebagai warga negara. (Rikard Bangun-2011)

Ancaman lain terhadap eksistensi Pancasila adalah globalisasi, globalisasi sendiri pengertiannya sangat beragam, ada yang pro dengan globalisasi ada juga yang kontra. Namun ada pula yang menyebut globalisasi sebagai mitos. Akan tetapi pendefinisian globalisasi akan lebih dekat dengan persoalan ekonomi politik yang mengalami perkembangan yang pesat pada awal dekade 1990-an. Globalisasi bisa

menjadi peluang dan bisa menjadi ancaman untuk bangsa ini karena globalisasi mempunyai makna yang negatif dan positif.

Ideologi mulai dihancurkan dengan paham praktis pragmatis yang mengesampingkan idealisme dan mementingkan pertumbuhan ekonomi. Kapitalisme global mengetengahkan, mementingkan individualisme untuk menghancurkan nilai sosial/masyarakat Pancasila. Kemudian dikembangkan demokrasi liberal yang menghalalkan yang menghalalkan politik marjinalisasi dan mengejar akumulasi pertumbuhan individu-individu. Sedangkan Pancasila yang mempunyai nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan Indonesia adalah mewujudkan berkeadilan sosial.(Moch. Marsinggih MD 2012)

Melihat pernyataan tentang pertentangan Pancasila dengan globalisasi, tentunya akan menghasilkan semacam antitesis globalisasi dari Pancasila, lalu dengan menggunakan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang sudah pakem dan tidak dapat lagi diganggu gugat oleh ideologi lain. Tetapi yang masih ironis adalah kita punya dasar negara yang maha dahsyat yang hadir karena kodrat adanya kompleksitas permasalahan, segala perbedaan sebagai keragaman yang membawa berkah bagi bangsa Indonesia dan nilai-nilai dari Pancasila sendiri diambil dari budaya bangsa, namun masih banyak disana-sini terlihat kemiskinan yang masih melanda negeri kita yang tercinta ini. Bagaimana Pancasila tetap eksisten ditengah gempuran globalisasi yang katanya menyempitkan masalah ideologi tetapi lebih banyak melangkah pada sistem kemitraan yang katanya saling menguntungkan ini.

Ekonomi Indonesia pada masa rezim Orde Baru lebih dikenal dengan nama Ekonomi Pancasila namun karena Ekonomi Pancasila itu lekat hubungannya dengan Orde Baru sehingga pasca masa Reformasi para pakar lebih elegan menyebutnya sebagai Ekonomi Kerakyatan. Namun dalam perjalanannya Ekonomi Kerakyatan tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh Pancasila.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Kabupaten Tegal sendiri sudah terlihat dari materi yang terkandung dalam visi dan misi serta RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014. Seperti yang kita ketahui struktur ekonomi Kabupaten Tegal ditopang tiga sektor utama, yaitu sektor primer (Pertanian dan Industri) dan sektor sekunder yaitu perdagangan. Sektor pertanian memiliki peranan sebesar 14,12 persen, sektor industri memiliki peranan sebesar 28,46 persen. Untuk sektor perdagangan memiliki sumbangan sebesar 31,12 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2011 sebesar 4,83 persen dan ini relatif lebih rendah dibanding tahun 2010 yang sebesar 5,29 persen. Dari beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6,76 persen disusul sektor bangunan sebesar 6,38 persen. Sedangkan sektoryang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian yaitu sebesar 2,46 persen.(BPS Kabupaten Tegal tahun 2010-2011)

Dalam perjalanannya perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal membutuhkan semacam perlindungan atau proteksi dalam bentuk kebijakan untuk melindungi ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal dari persaingan para pemodal besar yang tentunya akan sangat merugikan sebuah usaha dari masyarakat Kabupaten Tegal sendiri apabila tidak ada dukungan kebijakan dari Pemerintah secara nyata.

Masalah ekonomi memang menjadi masalah pembangunan daerah maupun nasional begitu juga di Kabupaten Tegal ini. Sebenarnya Kabupaten Tegal

mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan secara maksimal seperti kondisi wilayah yang bervariasi yaitu pesisir, dataran rendah serta dataran tinggi. Masing-masing wilayah ini pastinya mempunyai komoditas ekonomi yang beragam yaitu wisata pantai dan hasil laut didaerah pesisir, pusat perdagangan dan pusat perkotaan didaerah dataran rendah serta hasil perkebunan dan wisata alam didaerah dataran tinggi seharusnya ini menjadi modal penting dalam perluasan lapangan pekerjaan dimasing-masing wilayah yang tentunya perlu dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Hal ini perlu didukung kebijakan pengendalian penggunaan lahan, peningkatan kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan kapasitas aparat desa, mendorong peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga pelayanan dalam berbagai bidang (lembaga pelatihan, penyuluhan, layanan sosial dll), pemetaan sumberdaya manusia dengan menerapkan sistem informasi kependudukan dengan berbagai macam atributnya, perluasan dan pendayagunaan Teknologi.

B. PEMBAHASAN

B1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal 2009-2014

Kebijakan ekonomi Kabupaten Tegal sangat bergantung pada beberapa sektor yang sudah disematkan dalam sebuah Jargon PERTIWI (Pertanian, Industri dan Pariwisata), yang menjadikan acuan untuk membuat kebijakan ekonomi.

Berikut ini adalah kebijakan ekonomi yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal 2009-2014 :

Pertama, Penyediaan fasilitas perdagangan. Sektor perdagangan menduduki peringkat kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB, yaitu sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan sangat potensial untuk dikembangkan. Itulah sebabnya, dibutuhkan kebijakan penyediaan fasilitas perdagangan guna mendukung aktivitas perdagangan. Kebijakan tersebut dalam penerapannya dilaksanakan melalui program pengembangan infrastruktur perdagangan.

Kedua, Peningkatan Investasi. Investasi adalah salah satu jalur hubungan daerah dengan berbagai pihak. Investasi memiliki arti penting bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya strategis daerah, serta implementasi dan transfer keahlian dan teknologi. Dengan demikian investasi dapat menjadi salah satu solusi dalam memecahkan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Menyadari urgensi investasi maka perlu adanya kebijakan peningkatan investasi dan rencana aksi yang dapat memberikan daya tarik bagi tumbuh dan berkembangnya investasi, melalui program pembangunan pelibatan sumber daya paseduluran, program penciptaan iklim yang mendukung investasi, program peningkatan infrastruktur investasi, dan program pemasaran aktif.

Ketiga, Reformasi Kebijakan Bisnis. Kebijakan ini diperlukan dengan maksud untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Oleh karena itu, kebijakan bisnis yang dinilai menghambat perkembangan bisnis di daerah perlu dikaji dan dilakukan penyempurnaan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, dapat dilakukan dengan penerapan program penyederhanaan regulasi bisnis, dan program penciptaan lingkungan legal dan regulasi kondusif.

Keempat, Pengembangan Rumpun Usaha. Upaya perkuatan rumpun usaha yang saling terkait dalam rantai nilai perlu dilakukan untuk memberikan ungkitan

besar pada pendapatan masyarakat. Pada dasarnya setiap pelaku pada mata rantai nilai adalah organ ekonomi yang hidup dan membutuhkan perkuatan untuk meningkatkan aliran barang, jasa, uang, informasi dan pengetahuan. Itulah sebabnya diperlukan adanya kebijakan pengembangan rumpun usaha yang dilaksanakan melalui program peningkatan kolaborasi ekonomi dan program peningkatan skema pembiayaan berisiko.

Kelima, Pengembangan Eko-Efisiensi. Melalui kebijakan ini para pelaku usaha dilibatkan untuk memanfaatkan secara efisien sumber daya yang dimiliki termasuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan sosial yang ada di sekitarnya. Kebijakan pengembangan eko-efisiensi melalui pendekatan eko-efisiensi dapat diterapkan dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang ramah lingkungan, yang pada prinsipnya adalah menyelaraskan perbaikan lingkungan dengan menyentuh sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam tataran operasional, kebijakan dan pendekatan pengembangan keefisiensi diaplikasikan melalui program pengembangan insentif dan disinsentif.

Keenam, Perbaikan Sistem Produksi. Dalam dunia usaha, peningkatan produksi menjadi target utama yang terkadang kurang memperhatikan kondisi lingkungan. Fenomena ini merupakan persoalan serius yang harus segera memperoleh perhatian. Akar permasalahannya terletak pada bekerjanya sistem produksi yang dibangun. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan perbaikan sistem produksi dalam rangka mewujudkan penguatan industri yang ramah lingkungan dan penataan daerah industri. Untuk mendukung kebijakan tersebut, terdapat dua program yang akan dijalankan, yaitu program penguatan industri ramah lingkungan dan program penataan daerah industri.

Ketujuh, Inisiasi Klaster Industri Kreatif. Pengembangan industri kreatif harus tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan industri kreatif adalah sumber daya manusia, anggaran, teknologi penunjang, kebijakan pemerintah, dan infrastruktur fisik. Tahapan yang paling sulit dalam pengembangan industri kreatif adalah penciptaan apresiasi terhadap industri kreatif itu sendiri. Pengembangan industri kreatif berikutnya membutuhkan adanya kebijakan inisiasi klaster industri kreatif yang diterapkan melalui : (a) program pengembangan nilai ekonomi kegiatan kreatif; (b) program peningkatan transaksi industri kreatif; dan (c) program perbaikan lingkungan klaster.

Kedelapan, Pembudayaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam tatanan ekonomi modern, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang sangat penting utamanya untuk melindungi keberadaan setiap produk bisnis dan jasa yang dijalankan. Pelaksanaan dan perlindungan HKI akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong investasi dan pengalihan teknologi secara cepat, serta merangsang daya saing masyarakat dan perusahaan setempat. Untuk menyadarkan masyarakat akan urgensi HKI diperlukan kebijakan pembudayaan HKI, yang diimplementasikan melalui program perlindungan dan pemanfaatan HKI dan program fasilitasi perolehan HKI.

B2. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi di Kabupaten Tegal

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara global kita mengenal beberapa sistem ekonomi yang menjadi sebuah pijakan untuk menjalankan roda ekonomi. Ada sistem ekonomi pasar yang diterapkan oleh negara-negara yang menganut ideologi liberal, dan sistem ekonomi komando yang diterapkan oleh

negara-negara yang menganut ideologi komunis serta sistem ekonomi campuran seperti yang diterapkan di Inggris dan Jerman.

Indonesia sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila, serta menganut pula sistem ekonomi Pancasila maka akan menerapkan nilai-nilai ekonomi yang di amanatkan oleh Pancasila.

Sistem ekonomi kekeluargaan atau kelembagaan yang diamanatkan oleh Pancasila adalah sistem ekonomi kekeluargaan, penjelasannya sistem ekonomi kapitalis yang mengabsahkan penindasan kepada yang lemah, eksploitasi, individualisme. Sedangkan sistem ekonomi kekeluargaan tidak ada penindasan. Semuanya diatur secara keluarga pastinya hal-hal yang bersifat musyawarah dan mufakat yang tentunya sudah di jabarkan dalam pasal 33. Sistem ekonomi kekeluargaan juga dapat diartikan membangun perekonomian secara mandiri dengan pengertian tidak diperbolehkan menggantungkan pada asing atau biasa di sebut ekonomi kerakyatan. (Pancasila sebagai cita-cita dan UUD 1945 sebagai cara untuk mencapai cita-cita tersebut) oleh karena itu Pancasila harus jadi acuan pasal-pasal UUD 1945.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi acuan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya menjadi acuan kebijakan, dan turunan dari kebijakan ini adalah undang-undang dan peraturan dibawahnya, dari perumusan kebijakan, implementasi sampai pada evaluasi kebijakan.

Kebijakan ekonomi bangsa Indonesia tentunya harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai suatu ilmu tentunya dapat menjadi sebuah pisau analisis sebuah kebijakan ekonomi.

Proses pembuatan kebijakan harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena itu bagian dari perintah konstitusi kita. Namun dalam pelaksanaannya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembuatan kebijakan publik dalam hal ini kebijakan ekonomi tentu ada kendalanya.

kendala internal seperti orang atau si pembuat kebijakan itu tau tidak mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kemudian ada tidaknya ititkad baik dari si pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan mengacu pada Pancasila, kecenderungannya adalah pembuat kebijakan sudah terkontaminasi oleh neoliberalisme. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, lalu bagaimana solusi dari permasalahan itu.

Solusinya adalah dengan pencerahan Pancasila itu yang utama, pencerahan Pancasila pada para pembuat kebijakan, kemudian kaum penyelenggara negara, dan para elit politik kita.

Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan selalu di upayakan oleh orang-orang yang peduli terhadap Pancasila, oleh karenanya para pemerhati Pancasila selalu mengupayakan agar Pancasila selalu hadir pada sanubari masyarakat, terutama setiap kegiatan masyarakat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah menurunnya nilai-nilai Pancasila yaitu gotong-royong dalam tradisi kehidupan bangsa indonesia dan meningkatnya materialisme sehingga menjadikan masyarakat bersifat individual.

Gotong-royong mengendap dalam diri masyarakat dan elemen bangsa ini. Karakteristik gotong-royong adalah kebersamaan bukan individu, individu tumbuh sejalan dengan atmosfer globalisasi. Tujuan dari globalisasi antara lain menguasai bangsa Indonesia dengan IPTEK, semua negara yang menerima IPTEK harus punya daya saing. Globalisasi menganut pasar bebas, lemahnya daya saing akan membuat bangsa ini mudah di kuasai, kemudian globalisasi juga mendorong kepada ideologi dan konstitusi yang bersifat neoliberal.

Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya nilai-nilai Pancasila dalam hal ini gotong-royong adalah karena pengaruh globalisasi yang mau tidak mau membawa kita dalam pusaran pasar bebas, dengan adanya pasar bebas tentu dalam hal kebijakan ekonomi para pelaku usaha kecil menengah (UKM) perlu mendapatkan proteksi dari pemerintah.

Dalam kaitannya dengan pasar bebas atau *free market* bukan karena kita tidak mampu bersaing dengan produk asing. Namun perlu diperhatikan juga will pemerintah untuk memproteksi produk dalam negeri kita. Jangan sampailah di persaingan secara langsung tentu dengan tidak adanya persiapan yang cukup kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk asing.

Dalam rangka mengembangkan usaha menengah menjadi usaha besar, usaha kecil menjadi usaha menengah, dan usaha mikro menjadi usaha kecil, salah satu kendala yang dihadapi adalah modal untuk investasi dan modal untuk kerja.

Karena jangkauan pasar yang masih terbatas, teknologi yang digunakan belum efisien, dan manajemen usaha yang belum efisien, maka resiko kegagalannya cukup tinggi. Tingginya resiko gagal menyebabkan resiko investasinya juga besar. Tingginya resiko investasi dan rendahnya pemilikan *collateral*, menyebabkan lembaga keuangan bank kurang berminat memberi pinjaman kepada UKM.

Jumlah dana yang diberikan bank kepada UKM jauh dibawah tingkat permintaan UKM. Kekurangan pasokan ini selanjutnya diisi oleh lembaga kredit non bank, seperti KOSIPA, dan pengijon, dengan tingkat bunga jauh di atas tingkat bunga pasar. Intervensi pemerintah, melalui dana bantuan langsung ke masyarakat, seperti dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Inpres Desa Tertinggal (IDT), dan program sejenis, ternyata kurang efektif dan kurang efisien.

Kelembagaan keuangan mikro (*micro finance*) yang terbentuk dari program-program dimaksud, tingkat keberlanjutannya rendah, dan hampir tidak mampu memecahkan permasalahan tingkat suku bunga yang tinggi. Selain itu juga banyak menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah dan membutuhkan biaya *delivery* yang tinggi.

B3. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Menurut Mubyarto

a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral.

Asas ketuhanan Yang Maha Esa kiranya jelas merupakan dasar moral dari perilaku ekonomi manusia Indonesia. meskipun bahwa kesediaan mengendalikan diri, sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dari manusia Indonesia termasuk para pengusaha dan orang-orang kayanya, sebenarnya cukup besar.

Diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mencakup sila ketuhanan Yang Maha Esa yaitu mempertimbangkan moral serta sifat-sifat sitem moral ekonomi Indonesia itu memang telah melandasi atau menjadi pedoman perilaku ekonomi perorangan, kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dalam hal ini, diharapkan ada semangat pembangunan ekonomi tanpa ada diskriminasi antara pemodal besar dengan modal kecil. Dengan visi Kabupaten Tegal yang menciptakan Gotong royong serta bertaqwa Kepada Tuhan YME, Kabupaten Tegal harus jadi pelopor kebijakan yang Pancasilais dan menunjukkan keberpihakkannya pada pelaku usaha kecil dengan cara memberikan memprioritas kebijakan ekonomi kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

b. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Ada kehendak kuat dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian) sesuai asas-asas kemanusiaan.

Semangat kekeluargaan, cinta-mencintai, tenggang rasa, bila sudah merata pada seluruh anggota masyarakat, akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial menuju pemerataan sosial. Inilah manifestasi dari sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. berdasarkan pengalaman, semangat solidaritas akan menebal dalam keadaan susah dan prihatin, dan sebaliknya cenderung menipis dalam serba kemakmuran. Tetapi dalam hal ini pun banyak perkecualian, karena adanya kecenderungan kuat berkembangnya rasa sosial dan peningkatan kegiatan kemanusiaan pada saat seseorang mencapai sukses dalam bidang usaha. Sifat-sifat kedermawanan ini memang selalu terlihat berkembang bila orang menjadi semakin kaya, lebih-lebih bagi mereka yang taat beragama, karena ini sesuai pula dengan ajaran-ajaran beragama.

Dalam pelaksanaan program kebijakan proteksi usaha kecil misalnya masyarakat pelaku usaha kecil harus menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, agar terjadi jaring aspirasi sehingga perumusan kebijakan akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha kecil.

Kemerataan sosial dalam bidang ekonomi di Kabupaten Tegal terlihat dari adanya kluster industri pada UKM yang akhirnya membentuk Koperasi sebagai bagian dari usaha bersama, ini relevan dengan point koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Meskipun adanya koperasi ini masih inisiatif dari para pelaku usaha itu sendiri bukan dari pemerintah, akhirnya pemerintah pun bersedia memberikan stimulasi kepada koperasi para pelaku usaha ini.

c. Persatuan Indonesia. prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi.

Semangat nasionalisme di bidang ekonomi selalu menjiwai bangsa Indonesia. apabila terlihat menyurut semangat ini, disebabkan oleh unsur-unsur keterpaksaan karena semakin ketatnya persaingan internasional.

Kita harus bisa menganalisis setiap kasus kebijakan ekonomi yang hendak diambil oleh pemerintah, apakah akan menyumbang atau tidak pada peningkatan ketangguhan atau ketahanan ekonomi nasional. Misalnya secara lebih spesifik, setiap utang baru atau kerjasama ekonomi dengan negara lain bisa menyumbang atau malah sebaliknya mengancam ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional.

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Namun belum adanya kebijakan proteksi terhadap usaha kecil menengah di Kabupaten Tegal mau tidak mau harus secapatnya di rumuskan, agar para pelaku usaha kecil dapat dengan nyaman menjalankan usahanya karena sudah ada regulasi yang memberikan kelonggaran kepada mereka untuk berusaha.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama.

Dalam melaksanakan sistem ekonomi usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, kita mengenal tiga pelaku utamanya yaitu koperasi, usaha negara dan usaha swasta. Dari segi pandangan disiplin nasional yang harus atau wajib dipatuhi, kita bisa menyatakan bahwa masing-masing pelaku ekonomi tersebut mempunyai etika kerja sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial merupakan organisasi atau perkumpulan orang bukan perkumpulan modal yang dibentuk oleh para anggotanya untuk melayani kepentingan mereka, yaitu membantu memperjuangkan kepentingan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Ini berarti misi dari koperasi adalah pelayanan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin kepada anggota. Maka ukuran paling mendasar untuk menilai berhasil tidaknya koperasi adalah manfaat pelayanan kepada anggota.

Seperti yang dijelaskan diatas, adanya inisiatif dari para pelaku usaha dari beberapa klaster industri di Kabupaten Tegal yang telah sadar secara bersama-sama bersepakat untuk membuat koperasi sebagai wadah permodalan bagi rumpun usaha yang mereka geluti. Sebagai contoh klaster industri pembuatan tahu di Kabupaten Tegal yang menjadi pelopor pembentukan koperasi yang mereka namakan KOPTI (Koperasi Pengusaha Tahu Indonesia) meskipun koperasi ini tidak hanya ada di Kabupaten Tegal saja, namun semangat ini yang akhirnya menginspirasi klaster industri lain untuk membentuk koperasi. Sehingga berdiri Koperasi Karya Bahari yaitu Koperasi milik klaster industri perkapalan dan Koperasi Untung Bersama milik klaster industri *Metal Recycle* atau peleburan barang residu dari industri logam.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Keadilan sosial atau *sosial justice* merupakan masalah yang sudah lama menjadi perhatian para pemikir, khususnya filosof. Bangsa Indonesia mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir yang digambarkan sebagai masyarakat yang adil dan makmur, yang *gemah ripah karta raharja*, karena wujud akhir dari masyarakat bangsa yang dituju, jelas dimaksudkan sebagai masyarakat yang mengandung sifat-sifat keadilan dan kemakmuran yang lengkap, yang mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral.

Secara singkat, masyarakat adil dan makmur yang dituju adalah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat idaman yang secara lengkap dan utuh didasarkan pada kelima sila dalam Pancasila dan muaranya pada sila yang kelima yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh diwujudkan melalui realisasi prinsip keadilan dalam tiap-tiap aspek keadilan, yaitu hukum, ekonomi politik, sosial budaya, dan moral yang semuanya berkaitan erat.

Aspek keadilan sosial memang menjadi dambaan masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya di bidang pertanian dan perdagangan. Betapa tidak ada beberapa kasus yang membuat para pelaku usaha dibidang pertanian dan perdagangan begitu dilematis, seperti yang terjadi di Kecamatan Talang. Seolah Ekonomi Pancasila itu runtuh oleh segelintir orang bermodal besar, sehingga Koperasi Unit Desanya tidak bisa beroperasi lantaran gedungnya disewa oleh salah satu ritel ternama.

Kemudian gabah petani yang seharusnya bisa dijual di KUD dan bisa meminjam sedikit permodalan dari KUD tidak bisa, sehingga mereka mengandalkan pinjaman permodalan pada rente, yang sudah barang tentu sangat besar bunganya.

Yang menjadi sorotan lainnya adalah sektor pariwisata yang cenderung jalan di tempat, karena sebetulnya Kabupaten Tegal punya banyak potensi wisata yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan retribusi daerah, sehingga bisa memaksimalkan pendapatan daerah.

Jika semua program dalam kebijakan ekonomi Kabupaten Tegal bisa terimplementasi dengan baik serta sasarannya tertuju dengan tepat tentu akan sedikit memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil, sehingga harapan tentang keadilan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal bisa terwujudkan sekaligus mengurangi stigma buruk terhadap pemerintahan yang ada.

C. PENUTUP

Sistem ekonomi yang sesuai dengan amanat Pancasila adalah sistem ekonomi kekeluargaan, atau sistem ekonomi kerakyatan dan ada pula yang menyebutnya sistem ekonomi kelembagaan. Merupakan sistem ekonomi yang mengabsahkan nilai-nilai kekeluargaan yang bersifat musyawarah mufakat seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pancasila adalah cita-cita, sedangkan UUD 1945 adalah sebuah cara untuk mencapai cita-cita yang ada dalam Pancasila, oleh karena itu Pancasila harus jadi acuan pasal-pasal pada UUD 1945 serta undang-undang dibawahnya.

Kabupaten Tegal mempunyai visi Tegal Gotong Royong yang dilandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harapannya ini bukan hanya sekedar visi. Harus ada realisasi bahwa Tegal adalah Kabupaten Pelopor Gotong Royong serta pengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya.

Peraturan daerah (Perda) yang sudah ada perlu di tinjau kembali sesuai dengan tuntutan usaha kecil dan berpihak kepada usaha kecil sebagai roda ekonomi di Kabupaten Tegal, konsekuensi logis diberikan porsi yang memadai dalam APBD.

DAFTAR RUJUKAN

- Drijarkara, N., 2006, *Karya Lengkap Drijarkara*, Kanisius.
- Eatwell, Roger dan Anthony Wright, 2003, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Mediatir, Jakarta.
- Kaelan, M.S, 2010, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.
- Manullang, A.C, 1986, *Pilar-Pilar Pancasila*, Setia Sakti, Jakarta.
- Mubyarto, 2002. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Mubyarto, 1987, *Ekonomi Pancasila : gagasan dan kemungkinan*, LP3ES, Jakarta
- Rinakit, Sukardi, 2009, *Tuhan Tidak Tidur*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Saksono, Ign. Gatut, 2008, *Pancasila Soekarno*, Urna Cipta Media Jaya, Yogyakarta
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal 2009-2014